



## **BAB VIII**

# **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN**

Indikator program prioritas yang disertai indikasi kebutuhan pendanaan kan menjadi acuan bagi setiap OPD terkait yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai acuan keberhasilan selama periode RPJMD 2016-2021 digunakan data dasar tahun 2015, sehingga pada akhir periode RPJMD (2021) dapat ditentukan target capaian yang harus diwujudkan oleh setiap OPD.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan utama Kepala OPD untuk merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana Strategis (Renstra) OPD.

### **8.1. Janji Kepala Daerah**

Penetapan janji Walikota sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye pemilihan Kepala Daerah yang menjadi prioritas program pembangunan daerah Tahun 2016-2021. Indikator janji walikota, meliputi :

1. Program Depok peduli pendidikan.
2. Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan pembangunan RSUD wilayah timur.
3. Pembangunan taman terpadu di setiap Kelurahan
4. Pembangunan pusat kreasi rakyat dan panggung budaya kreatif
5. Revitalisasi pasar tradisional yang bersih dan nyaman dan penyediaan 1000 kios UMKM.
6. Pembangunan sentra industri kreatif.
7. Peningkatan insentif RT, RW dan LPM
8. Peningkatan dana operasional bagi kader psoyandu dan posbindu
9. Pemberiaan dana insentif bagi pembimbing rohani
10. Pembangunan alun-alun Kota

### **8.2. Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Daerah**

Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari isu strategis Kota Depok. Penetapan prioritas pembangunan dijabarkan dalam program dan indikator program pembangunan daerah Tahun 2016-2021.



**Prioritas Pembangunan** Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Membangun Infrastruktur Publik dan penataan Kota yang nyaman dan ramah
2. Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi dengan meningkatkan sektor Strategis domestik/lokal
3. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan
6. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat
7. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kokoh dan mandiri

Selain prioritas pembangunan, terdapat program unggulan yang merupakan skala prioritas dalam rangka memecahkan permasalahan utama dalam lima tahun kedepan. **Program Unggulan** Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Depok Kota Sehat
2. Depok Kota Bersih
3. Depok Kota Ramah Keluarga

### **8.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang yang menjadi tanggung jawab Daerah, maka disusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan Daerah serta sekaligus memuat penjabaran dari Visi Misi Kota Depok. Program tersebut disertai pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada.

Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan Standar Satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Indikasi rencana program prioritas berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kota Depok).



## **BAB IX**

# **INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RPJMD pada akhir periode Perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indicator outcome dari pelaksanaan program Pembangunan Daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua OPD pada Pemerintah Kota Depok selama 5 tahun dengan para pemangku kepentingan Daerah.

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Pembangunan Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan Daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025, hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2021. Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur Pembangunan Daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan Pembangunan Jangka menengah.

Target capaian indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 9.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Misi RPJMD 2016-2021**

MISI	INDIKTOR KINERJA	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan</b>	Survey kepuasan masyarakat	80,66 (baik)	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Initial (level 1)	Initial (level 1)	Infrastruktur (level2)	Infrastruktur (level2)	Integrated (level3)	Integrated (level3)	Integrated (level3)	Integrated (level3)
	Predikat SAKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
	Sistem Pelayanan Pemerintah berbasis Teknologi Informatika	5 OPD (43%)	2 OPD (55%)	4 OPD (77%)	4 OPD (87%)	4 OPD (90%)	4 OPD (95%)	4 OPD (98%)	4 OPD (98%)
<b>Misi II : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing</b>	Meningkatnya Indeks Pendidikan	73,27	74,39	75,53	76,67	77,82	78,97	80,14	80,14
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB	100,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB	83,82%	83,87%	83,92%	83,97%	84,02%	84,07%	84,12%	84,12%
	Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB	78,56%	80,85%	83,14%	85,43%	87,72%	90,01%	92,30%	92,30%
	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5	5,68	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,00	8,00
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/ Paket B minimal 6,5	6,04	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,00	8,00
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C minimal 6,5	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50	6,50
	Meningkatnya persentase Sekolah berakreditasi minimal B	90%	93%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
	Meningkatnya persentase Lembaga PAUDNI yang terakreditasi	38,53	49,67	60,80	71,94	83,07	94,21	100	100
	Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi S1/D4	89,55	89,60	89,65	89,70	89,75	89,80	89,85	89,85
	Persentase minat baca masyarakat	NA	30%	35%	40%	45%	50%	55%	55%
	Cakupan kerjasama dengan perguruan tinggi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase organisasi komunitas kepemudaan yang kreatif dan mandiri	50%	50%	58%	72%	83%	93%	100%	100%
	Jumlah Prestasi olahraga (cabang olahraga)	15	18	20	25	27	30	32	32



MISI	INDIKTOR KINERJA	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah prestasi seni budaya(jenis)	0	0	5 jenis	6 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis
	Tingkat Tataan kota sehat	2	2	4	4	6	6	7	7
	Angka kematian bayi (orang)	63	63	60	60	58	58	56	56
	Angka kematian ibu (orang)	14	14	14	13	13	13	13	13
	Prevalensi gizi buruk (persen)	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
	Cakupan pelayanan kesehatan peserta JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Peringkat Kota Layuak Anak	madya	madya	nindya	nindya	utama	utama	KLA	KLA
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,96	92,00	92,01	92,07	92,13	92,20	92,23	92,23
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,15	81,26	81,33	82,01	82,24	82,63	83,13	83,13
	PMKS yang ditangani	33,7%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
	Penerapan dimensi Kota Ramah Lansia	0	2	2	4	4	6	6	6
	Laju pertumbuhan penduduk	3,57%	3,50%	3,43%	3,36%	3,29%	3,22%	3,15%	3,15%
	TFR (Total Fertilty Rate)	2,16	2,13	2,10	2,07	2,04	2,02	2,01	2,01
	Angka Perceraian	3.195 kasus	2500 kasus	2500 kasus	2500 kasus	2500 kasus	2500 kasus	2500 kasus	2500 kasus
<b>Misi III : Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan</b>	Jumlah UMKM mandiri	600 UMKM	600 UMKM	606 UMKM	612 UMKM	618 UMKM	624 UMKM	630 UMKM	630 UMKM
	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	11,86	11,99	12,12	12,25	12,38	12,42	12,55	12,55
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota (%)	21,89	22,52	23,07	23,54	24,06	24,63	25,03	25,03
	SKM pasar rakyat (point)	72,83	81,35	81,35	81,35	81,35	81,35	81,35	81,35
	SKM Pelayanan perizinan (point)	81,85	81,95	82,00	82,01	82,02	82,03	82,04	82,04
	Kenaikan Nilai Investasi per tahun (Milyar)	4.82300	5.064,15	5.317,36	5.583,23	5.862,39	6.155,51	6.463,28	6.463,28
	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,34 %	63,97%	64,57%	65,17%	65,80%	66,40%	66,97%	66,97%
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,09 %	7,59 %	7,56 %	7,50 %	7,50 %	7,67 %	7,31 %	7,31%
	indeks Gini Rasio	0,365	0,364	0,366	0,362	0,362	0,361	0,36	0,36
	Persentase Koperasi Aktif	64%	71%	78%	85%	92%	99%	100%	100%
	Persentase Koperasi sehat	13%	16%	19%	23%	26%	29%	32%	32%
	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi.	59%	67%	75%	83%	92%	95%	100%	100%
	PDRB Kota (dalam juta rupiah)	48.316.116,52	54.191.489,97	60.582.949,46	67.510.300,44	74.950.245,71	83.132.915,01	91.657.605,57	91.657.605,57
	Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota	1,46 %	1,44 %	1,41 %	1,39 %	1,38 %	1,36 %	1,36 %	1,36 %



MISI	INDIKTOR KINERJA	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah Kunjungan Wisata	9,987	1,5 juta	2 juta	2,5 juta	3 juta	3,5 juta	4 juta	4 juta
	Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB kota	21,89 %	22,52 %	23,07%	23,54 %	24,06 %	24,63 %	25,03 %	25,03 %
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	29,10%	34,18%	36,10%	36,59%	37,40%	37,82%	38,76%	38,76%
	PDRB Hijau (Rp)	NA	51.191.489,97	57.582.942,46	64.510.300,44	71.950.245,71	80.132.915,01	88.657.605,57	88.657.605,57
	APBD, APBDP, APBN, Pemerintah daerah lainnya	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
<b>Misi IV : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga</b>	Tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang	98,22%	98,51%	98,81%	99,11%	99,40%	99,70%	100%	100%
	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi	93,98%	93,98%	93,98%	95,18%	96,76%	98,36%	99,99%	99,99%
	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan utama	32 km/jam	33,8 km/jam	35,9 km/jam	37,3 km/jam	38,4 km/jam	40,2 km/jam	45,1 km/jam	45,1 km/jam
	Rasio volume per kapasitas jalan di jalan utama	0,83	0,78	0,75	0,72	0,70	0,68	0,65	0,65
	Modal share (pangsa moda transportasi) angkutan umum	21,86%	23,38%	25,01%	26,75%	28,61%	30,61%	32,74%	32,74%
	Persentase luas ruang terbuka hijau publik	10,06%	10,46%	10,86%	11,26%	11,66%	12,06%	13,00%	13,00%
	Persentase ruang terbuka hijau publik yang tertata	18,22%	18,28%	18,8%	19,41%	19,99%	20,59%	21,28%	21,28%
	Ketaatan terhadap RTRW	5%	5%	10%	50%	55%	60%	65%	65%
	Luas genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	133,76 ha	122,61 ha	111,46 ha	100,31 ha	89,16 ha	78,01 ha	66,88 ha	66,88 ha
	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;	73,58%	72,09%	73,25%	76,79%	81,95%	86,83%	87,00%	87,00%
	Persentase tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari	19,90%	30,20%	37,00%	38,30%	53,40%	53,00%	51,20%	51,20%
	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kota Depok	70,04%	70,04%	75,04%	80,04%	85,04%	90,04%	95,04%	95,04%
	Rasio permukiman layak huni	97,28%	97,28%	97,48%	97,68%	97,88%	97,90%	97,92%	97,92%
	persentase rumah layak huni	98,16%	98,69%	98,96%	99,23%	99,50%	99,70%	100,00%	100,00%
	persentase pengurangan sampah di sumber;	9,7%	11,2%	12,7%	14,2%	15,7%	17,2%	20,00%	20,00%
	persentase	63,70%	66,0%	68,7%	71,5%	74,5%	77,5%	80,0%	80,0%



MISI	INDIKTOR KINERJA	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR (2021)	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
	sampah tertangani								
	Volume lumpur tinja yang diolah di IPLT (m3/hari);	30	60	60	228	270	321	375	375
	persentase penduduk terlayani sistem air limbah yang memadai	73,49%	73,62%	73,88%	74,13%	74,37%	74,6%	74,82%	74,82%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	NA	50	51	53	55	57	60	60
<b>Misi V : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran kehidupan</b>	Rumah tangga,sekolah dan masyarakat yang terbina	5%	5%	6%	8%	10%	15%	17%	17%
	Jumlah partisipasi masyarakat/kelompok masyarakat dalam aktivitas sosial, dan pembangunan	5%	5%	10%	15%	20%	22%	25%	25%
	Intensifikasi promosi penegakan bahaya narkoba	0	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kecamatan
	Jumlah fasilitas Pelayanan pengobatan konseling bagi pengguna narkoba	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	Jumlah Lembaga sosial keagamaan,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Institusi dan lembaga dalam pembinaan dan pelatihan bela negara	74.40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penanganan gangguan ketertiban masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah keikutsertaan institusi pendidikan dan organisasi kepemudaan	24 OKP	24 OKP	28 OKP	35 OKP	40 OKP	44 OKP	48 OKP	48 OKP





**Tabel 9.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN</b>								
1	Indeks Pembangunan Manusia	79,11	79,60	80,11	80,62	81,13	81,63	82,14	79,11
<b>A</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>								
1	Laju Inflasi	7,49%	4,25%	3,94%	3,66%	3,28%	3,02%	2,74%	2,74%
2	PDRB per kapita (adhb)	Rp 21.530.978,43	Rp 24.860.873,69	Rp 26.871.884,44	Rp 28.971.270,30	Rp 31.140.244,07	Rp 33.463.328,00	Rp 35.768.800,69	Rp 35.768.800,69
3	Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan	97,82%	97,82%	97,82%	97,82%	97,82%	97,82%	97,83%	97,83%
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,09 %	7,59 %	7,56 %	7,50 %	7,50 %	7,67 %	7,31%	7,31%
<b>B</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
	<b>PENDIDIKAN</b>								
1	Indeks Pendidikan	73,27	74,39	75,53	76,67	77,82	78,97	80,14	80,14
2	Angka harapan rata-rata lama sekolah	13,52 tahun	13,78 tahun	14,03 tahun	14,29 tahun	14,54 tahun	14,80 tahun	15,06 tahun	15,06 tahun
3	Angka rata-rata lama sekolah	10,71 tahun	10,83 tahun	10,96 tahun	11,09 tahun	11,22 tahun	11,36 tahun	11,49 tahun	11,49 tahun
4	Angka partisipasi kasar								
a	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	100,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	83,82%	83,87%	83,92%	83,97%	84,02%	84,07%	84,12%	84,12%
5	Angka Partisipasi Murni								
a	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	87,92%	88,01%	88,10%	88,18%	88,27%	88,36%	88,45%	88,45%
b	Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	62,41%	62,47%	62,53%	62,60%	62,66%	62,72%	62,79%	62,79%



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KESEHATAN</b>									
6	Angka usia harapan hidup	74.10 tahun	74.09 tahun	74.14 tahun	74.18 tahun	74.23 tahun	74.27 tahun	74.31 tahun	74.31 tahun
7	Persentase balita gizi buruk	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
<b>FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA</b>									
1	Cakupan gelar seni	1 pagelaran dan festival	2 pagelaran dan festival	5 pagelaran dan festival	10 pagelaran dan festival	10 pagelaran dan festival	10 pagelaran dan festival	10 pagelaran dan festival	47 pagelaran dan festival
2	Cakupan misi kesenian	2 misi seni budaya	3 misi seni budaya	5 misi seni budaya	5 misi seni budaya	5 misi seni budaya	6 misi seni budaya	6 misi seni budaya	30 misi seni budaya
3	Cakupan sumber daya manusia kesenian	30 seniman/budayawan	50 seniman/budayawan	50 seniman/budayawan	50 seniman/budayawan	50 seniman/budayawan	50 seniman/budayawan	50 seniman/budayawan	300 seniman/budaya
4	Jumlah gedung olah raga	0	0	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kota	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kota dan 4 GOR Kecamatan
<b>II ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<b>A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>									
<b>PENDIDIKAN</b>									
<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	56.06%	61.06%	66.06%	71.06%	76.06%	81.06%	86.06%	86.06%
<b>Pendidikan Dasar</b>									
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	489	489	489	489	489	489	489	489
3	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	23	23	23	23	23	23	23	23
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	87.92%	88.01%	88.10%	88.18%	88.27%	88.36%	88.45%	88.45%
5	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99.09%	99.11%	99.13%	99.15%	99.17%	99.19%	99.21%	99.21%
<b>Fasilitas Pendidikan</b>									
6	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	66.49%	66.56%	66.62%	66.69%	66.76%	66.82%	66.89%	66.89%



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	37.96%	38.42%	41.28%	44.14%	47.00%	49.80%	52.60%	52.60%
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	62.41%	62.47%	62.53%	62.60%	62.66%	62.72%	62.79%	62.79%
	<b>Angka Putus Sekolah:</b>								
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.004%	0.003%	0.002%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.05%	0.045%	0.040%	0.035%	0.030%	0.025%	0.020%	0.020%
	<b>Angka kelulusan</b>								
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	97.94%	98.28%	98.62%	98.96%	99.30%	99.64%	100.00%	100.00%
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98.74%	98.95%	99.16%	99.37%	99.58%	99.79%	100.00%	100.00%
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	78.56%	80.85%	83.14%	85.43%	87.72%	90.01%	92.30%	92.30%
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	69.70%	73.41%	77.12%	80.83%	84.54%	88.25%	91.96%	91.96%
	<b>KESEHATAN</b>								
1	Rasio Tempat Tidur per satuan penduduk	0,96/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000	1/1000
2	Rasio dokter per satuan penduduk	44,87/100.000	45/100.000	45/100.000	45/100.000	45/100.000	45/100.000	45/100.000	45/100.000
3	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk (Perawat & bidan)	179,48/100.000 ;119,65/100.000	180/100.000 ;120/100.000	180/100.000 ;120/100.000	180/100.000 ;120/100.000	180/100.000 ;120/100.000	180/100.000 ;120/100.000	180/100.000 ;120/100.000	180/100.000 ;120/100.000
	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>								
4	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	94,3%	95%	95%	96%	96%	97%	98%	98%
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	79,8%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	85%



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92,9%	95%	96%	97%	98%	99%	99%	99%
7	Cakupan pelayanan nifas	92,9%	95%	96%	97%	98%	99%	99%	99%
8	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	12,1%							
9	Cakupan kunjungan bayi	94,2%	95%	95%	96%	96%	97%	98%	98%
10	Cakupan Keluruhan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	8%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
12	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	97%	97%	98%	98%	99%	99%	100%	100%
14	Cakupan <i>Acute Flacid Paralysis</i> (AFP)	9%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
15	Cakupan Penemuan Penderita pneumonia Balita	15%	15%	25%	35%	50%	65%	75%	75%
16	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	53,8%	55%	55%	58%	60%	60%	65%	65%
17	Cakupan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan Penemuan Penderita Diare anak balita	4,2%	5%	7%	10%	12%	14%	15%	15%
19	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	masyarakat miskin								
20	Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)		7 Puskesmas :Cimanggis, Sukmajay,Beji,Pan mas,Bojongsari,Kedaung/Sawangan,Tapos	7 Puskesmas : Cimanggis, Sukmajay,Beji,Pan mas,Bojongsari,Kedaung/Sawangan,Tapos	1 Puskesmas : Cinere	1 Puskesmas : Ratujuaya/Cipayung	1 Puskesmas : Cilodong	1 Puskesmas :Limo	11 Puskesmas : Cimanggis, Sukmajay,Beji,Pan mas,Bojongsari,Kedaung (Sawangan),Tapos, Cinere, Ratujuaya(Cipayung),Cilodong, Limo
21	Persentase balita ditimbang berat badan D/S	80%	82%	84%	86%	88%	90%	92%	92%
<b>Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>									
22	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	17,64%	17%	16%	16%	15%	15%	14%	14%
23	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota								
24	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Cakupan Kelurahan Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Persentase yang memiliki akses terhadap air bersih	82,39%	84%	86%	88%	90%	92%	95%	95%
27	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	4	6	15	25	35	45	63	63
28	Persentase ibu hamil, penderita TB yang menerima konseling dan testing HIV dan AIDS	25%	25%	28%	28%	32%	32%	35%	35%



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Persentase Kecamatan yang melaksanakan advokasi dan sosialisasi pencegahan dan penularan	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	98,22% (467,69 km dari total panjang jalan kota 476,15km)	99,87% (475,54 km dari total panjang jalan kota 476,15km)	100% (476,15 km dari total panjang jalan kota 476,15km)					100% (476,15 km dari total panjang jalan kota 476,15km)
2	Panjang jalan kota dalam kondisi baik ( > 20 KM/Jam )	467,54 km	475,54 km	476,15 km	481,65 km	488,15 km	496,65 km	506,15 km	506,15 km
3	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	98.22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	467,685 Km	476,15 Km	476,15 Km	482,23 Km	490,21 Km	498,33 Km	506,61 Km	506,61 Km
5	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	8,0246 Km	10,146 Km	10,146 Km	16,226 Km	24,206 Km	32,326 Km	40,606 Km	40,606 Km
6	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	13.05%	13.05%	13.57%	14.11%	14.67%	15.25%	15.85%	15.85%
7	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	12.44	10	10	10	10	10	10	10
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	87,38%	87,38%	bertambah 3,5%	bertambah 3,85%	bertambah 4,25%	bertambah 0,51 %	bertambah 0,51%	100%
2	Kawasan Kumuh	2,71%	1,554	berkurang 0,5%	berkurang 0,5%	berkurang 0,5%	berkurang 0,027%	berkurang 0,027%	0%
3	Lingkungan pemukiman kumuh	2,71%	1,554	berkurang 0,5%	berkurang 0,5%	berkurang 0,5%	berkurang 0,027%	berkurang 0,027%	0%
4	Rasio Rumah layak huni	92,59%	92,59%	92,86%	93,13%	93,40%	93,67%	93,94%	93,94%



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUANGAN MASYARAKAT</b>									
1	Jumlah demo	25	20	20	20	20	20	20	20
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)/ Radius Pelayanan UPT/Pos Damkar)	6	1	1	1	1	1	1	12
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75.00%	83.33%	83.40%	83.50%	83.60%	83.80%	84.00%	84.00%
<b>SOSIAL</b>									
1	Pelayanan sarana sosial seperti panti asuhan, rumah singgah	1 RPSA	1 RPSA	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah	1 Rumah Singgah
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	21,9%	21,9%	21,9%	25%	25%	25%	25%	25%
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	40%	40%	40%	45%	50%	55%	55%	55%
4	Kemiskinan	2,18 %	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,16%	2,16%
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>									
<b>TENAGA KERJA</b>									
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	63,34 %	63,97%	64,57%	65,17%	65,80%	66,40%	66,97%	66,97%
2	Pelayanan Penyelesaian hubungan industrial dan permasalahan hubungan industrial lainnya (Kasus yang diselesaikan )	30 kasus	40 kasus	40 kasus	40 kasus	40 kasus	40 kasus	40 kasus	240 kasus
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	450	450	450	450	450	450	450	450



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenakerjaan dan Kesehatan	64050	64100	64150	64200	64250	64300	64350	64350
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	90.45%		90.6%	90.7%	90.8%	90.9%	91%	91%
<b>PANGAN</b>									
1	Regulasi ketahanan pangan	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi	2 Regulasi
2	Ketersediaan pangan utama	8.631.630 kg	7.398.540 kg	7.398.540 kg	7.398.540 kg	7.398.540 kg	7.398.540 kg	7.398.540 kg	7.398.540 kg
3	Nilai Pola Pangan Harapan	98,17	98,27	98,29	98,40	98,52	98,60	98,70	98,70
<b>PERTANAHAN</b>									
1	Jumlah pemindahan alas hak masyarakat kurang mampu	50 tanda bukti	55 akte	55 akte	55 akte	55 akte	55 akte	55 akte	55 akte
2	Luas pengadaan lahan pemerintah	4 area	3 area	3 area	3 area	3 area	3 area	3 area	3 area
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>									
1	Luas lahan yang dikonservasi	6,25 Ha	6,25 Ha	12,5 Ha	18,75 Ha	25,00 Ha	31,25 Ha	37,50 Ha	37,50 Ha
2	Kualitas Air Sungai Utama	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III
3	Tingkat Kualitas Udara ambien	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
1	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	86%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%





NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA)	0%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
4	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 Tahun	66%	77.5%	80%	82.5%	85%	87.5%	90%	95%
5	Kepemilikan Akta Kematian	15%	20%	25%	35%	45%	70%	75%	75%
<b>PEMBEDYAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
1	Jumlah PKK aktif	6080	6080	6085	6090	6095	6100	6105	6105
2	Jumlah Posyandu Aktif	1010	1005	1015	1025	1035	1045	1050	1050
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok	6 Kelompok
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	63	63	63	63	63	63	63	63
5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
1	Cakupan peserta KB aktif	74.29%	74.60%	74.80%	75%	75.20%	75.40%	76.20%	76.20%
2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	12,977	12,977	12,577	12,177	11,777	11,377	10,977	10,977
3	Keluarga Pra Sejahtera (KK)	6,442	6,442	6,242	6,042	5,842	5,642	5,442	5,442
4	Keluarga Keluarga Sejahtera I (KK)	6,535	6,535	6,335	6,135	5,935	5,735	5,535	5,535



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PERHUBUNGAN</b>									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	144,523,320	154,586,418	165,350,206	176,863,472	189,178,402	202,350,816	216,440,419	216,440,419
2	Rasio ijin trayek (%)	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0
3	Jumlah uji kir angkutan umum (kendaraan)	18,549	18,549	18,549	18,549	18,549	18,549	18,549	18,549
4	Jumlah Terminal (lokasi)	2		1				2	5
		- Term. Margonda		- Term. Jatijajar				- Term. Jatimulya	
		- Term. Sawangan						- Term. Cinere	
5	Kepemilikan KIR angkutan umum	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.39%
6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit	60 Menit
7	Pemasangan Rambu-rambu (unit)	94	256	85	80	95	105	100	721
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
1	Web site milik pemerintah daerah	106	106	106	106	106	106	106	106
2	Jumlah jaringan komunikasi	20	20	25	30	35	40	45	45
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk daerah	54	55	60	65	70	75	80	80
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal yang masuk daerah pertahun	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
1	Persentase Koperasi aktif	63.85%	64%	71%	78%	85%	92%	99%	100%
2	Persentase Koperasi sehat	13%	16%	19%	23%	26%	29%	32%	32%
3	Persentase UMKM Mandiri	600 UMKM	1%	1%	1%	1%	1%	1%	5%
4	Pertumbuhan Wirausaha Baru	130	170	170	170	170	90	90	990



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KEPEMUDAAAAN DAN OLAH RAGA</b>									
1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	1	0	0	1 buah
2	Lapangan olahraga .	0	0	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kota	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kecamatan	1 GOR Kota dan 4 GOR Kecamatan
<b>STATISTIK</b>									
1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam perda	1 dok (Revisi RPJPD 2005-2025)	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam perda	-	1 dok (RPJMD 2016-2021)	-	1 dok (Revisi RPJMD 2016-2021)	-	-	1 dok ( RPJMD 2021-2025)	3 dok
3	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Perkada	2 dok (RKPD 2016 dan RKPD P 2015)	2 dok (RKPD 2017 dan RKPD P 2016)	2 dok (RKPD 2018 dan RKPD P 2017)	2 dok (RKPD 2019 dan RKPD P 2018)	2 dok (RKPD 2020 dan RKPD P 2019)	2 dok (RKPD 2021 dan RKPD P 2020)	2 dok (RKPD 2022 dan RKPD P 2021)	12 dok
<b>KEBUDAYAAN</b>									
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	5	10	10	10	10	10	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	3	5	5	5	5	5	5
<b>PERPUSTAKAAN</b>									
1	Jumlah perpustakaan (unit)	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	25961	27000	29000	31000	33000	35000	37000	37000
<b>KERASIPAN</b>									
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku (OPD)	5	2	4	4	4	4	4	27
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	50	100	105	105	105	105	105	625



NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN PILIHAN</b>									
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
1	Produksi perikanan konsumsi (kg)	37.574.939	38.326.437	39.092.965	39.874.824	40.672.320	41.485.766	42.315.481	42.315.481
2	Produksi ikan hias (kg)	85.913.624	87.631.896	89.384.533	91.172.223	92.995.667	94.855.580	96.752.691	96.752.691
<b>PARIWISATA</b>									
1	Pengembangan Destinasi Wisata dan Promosi Wisata (lokasi)	10	5	5	2	2	3	3	10
2	Kontribusi PDRB Parawisata	0,00%	0,75%	0,80%	0,85%	0,90%	0,95%	1,00%	1,00%
<b>PERTANIAN</b>									
1	Produksi tanaman Pangan dan Hortikultura unggulan	1,598	1,600	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	1,46 %	1,44 %	1,41 %	1,39 %	1,38 %	1,36 %	1,36 %	1,36 %
<b>PERDAGANGAN</b>									
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	21,89%	22,52%	23,07%	23,54%	24,06%	24,63%	25,03%	25,03%
2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	74.101.860,19	76.324.915,2	76.614.663,48	80.973.103,38	83.402.296,49	85.904.365,38	88.481.496,34	
3	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar rakyat (unit)		3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
<b>PERINDUSTRIAN</b>									
1	Jumlah Pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	48	48	48	48	48	48	48	48
2	Kontribusi PDRB Terseir	46,52%	47,25%	47,83%	48,24%	48,70%	49,12%	49,46%	49,46%



## **BAB X PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan. Disamping itu, RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 harus mencakup pedoman transisi.

### **Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir satu antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah Pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir Periode RPJMD dan masalah-masalah Pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.



### **Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kota Depok 2016-2021 dapat langsung menjadi acuan bagi seluruh OPD kota Depok maupun masyarakat sehingga tercapai optimalisasi nilai-nilai Pembangunan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan RPJMD ini antara lain :

1. Pemerintah Daerah (seluruh OPD) serta masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan, dan mengacu visi, misi, dan arah pembangunan RPJM Daerah 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota Depok berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan sumber daya Daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah.
3. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2016-2021 guna mewujudkan kinerja program dan kegiatan yang sinergis dan bernilai tambah tinggi.
4. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Depok berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 dan memperhatikan perkembangan isu strategis. Dalam kaitan ini Bappeda berkewajiban memandu dan memverifikasi rancangan Renstra OPD sebelum disahkan oleh Walikota. Bappeda juga berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada RPJMD Kota Depok 2016-2021, yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja oleh OPD serta KUA-PPAS.



5. Mengingat bahwa beberapa program prioritas tergantung pembiayaannya dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka diperlukan kesepakatan bersama (MoU) antara para pihak. Beberapa program juga sangat tergantung peran dunia usaha dan masyarakat sehingga diperlukan sistem atau mekanisme koordinasi pembangunan yang berorientasi *Good Governance*.
  
6. Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah dilakukan tiap tahun dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok 2016-2021. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, sebagai berikut :



- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD.
  - b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana Pembangunan dari masing-masing Pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  - c. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan OPD periode sebelumnya.
  - d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- 7.** Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/atau merugikan/bertentangan dengan kepentingan Nasional. Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan Kebijakan Nasional. RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka Panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS